

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT NARKOTIKA
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Narkotika adalah salah satu satuan kerja tingkat Eselon II pada Deputy Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional. Sementara itu tugas dan fungsi Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, intinya adalah melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Bidang Pemberantasan Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

Dalam melaksanakan tugas P4GN tersebut, Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional, penyusunan dan perumusan standar dan prosedur kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan instansi pemerintah terkait, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Pemetaan, Penyelidikan dan Pemusnahan Ladang Ganja dan Tanaman terlarang lainnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam program P4GN.

B. DASAR HUKUM

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
5. Penetapan Kinerja Direktur Narkotika BNN tahun 2024.
6. Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Narkotika T.A.2024.

C. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan merupakan unsur pelaksana tugas eselon II yang dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Deputy Pemberantasan BNN.

Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pasal 146,169-175 yaitu melaksanakan tugas Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Bidang Pemberantasan.

2. Fungsi

Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan sebagaimana yang tertuang Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan Kegiatan Operasional dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan program P4GN pada Direktorat Narkotika.
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Program Kegiatan Operasional Direktorat Narkotika dalam rangka pelaksanaan P4GN.

- c. Penyusunan Organisasi tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional Pemutakhiran data Direktorat Narkotika .
- d. Pelaksanaan Kegiatan Operasional Direktorat Narkotika.
- e. Pelaksanaan Kerjasama Nasional, regional dan internasional dalam rangka kegiatan operasional Direktorat Narkotika.
- f. Pemberantasan melalui Operasi Pemberantasan Narkotika Direktorat Narkotika dalam rangka pelaksanaan P4GN.
- g. Penyusunan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Operasional

D. PERAN STRATEGIS

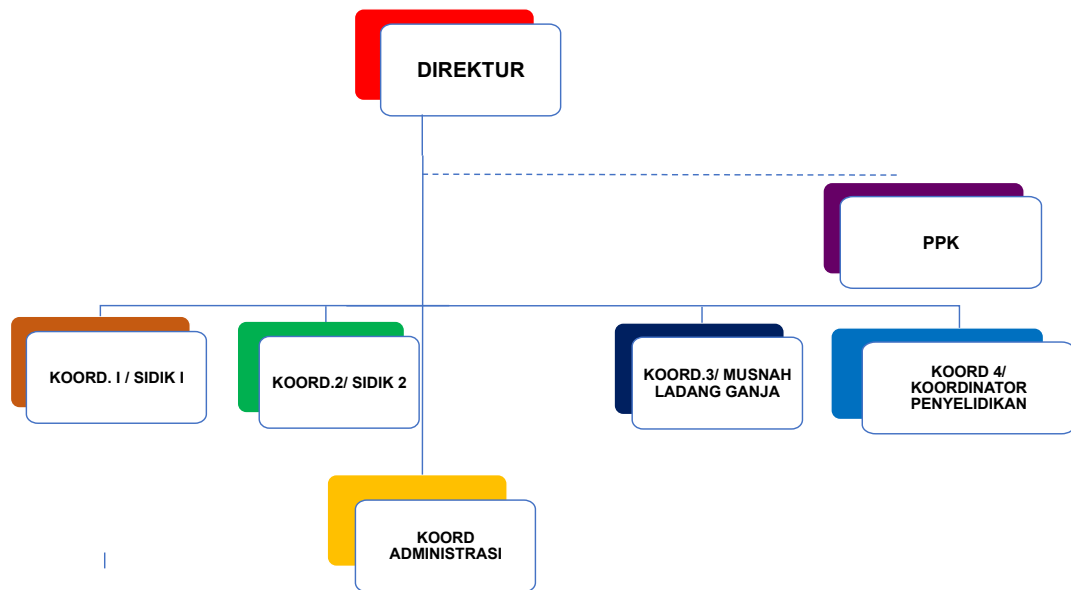
Sebagai representasi pemerintah dalam bidang P4GN sesuai dengan Tugas, Fungsi, dan Kewenangannya dalam hal penanganan permasalahan Jaringan narkoba, Pemetaan, Penyelidikan dan Pemusnahan ladang ganja dan Tanaman terlarang lainnya, peran strategis Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan adalah mengupayakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba secara profesional.

Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan sebagai *vocal point* dalam penanganan permasalahan narkoba baik alami maupun sintetis khususnya di bidang pemberantasan mempunyai strategi-strategi yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan P4GN antara lain Memberantas Sindikat Jaringan Narkoba Alami dan Narkoba Sintetis dan memetakan dan memusnahkan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan terdiri atas :

- a. Koordinator Narkoba Alami
- b. Koordinator Narkoba Sintetis
- c. Koordinator Ladang Ganja dan PTTA
- d. Kelompok Jabatan Fungsional



Tugas masing-masing Koordinator dibawah Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinator Sidik 1 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyidikan Jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Koordinator Sidik 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyidikan Jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- c. Koordinator Ladang Ganja mempunyai tugas melaksanakan Operasi Pemusnahan Ladang Ganja dengan kegiatan Pemetaan ,penyelidikan, pemusnahan dan melaksanakan kegiatan Peta Tematik dengan kegiatan Penerbangan Pesawat Tanpa Awak (PTTA) dengan tujuan untuk mendapatkan titik titik lokasi lahan tanaman ganja yang siap dimusnahkan.
- d. Koordinator Lidik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyelidikan Jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- e. Koordinator Administrasi mempunyai Tugas mendukung pelaksanaan Administrasi Direktorat Narkotika (Support System).

F. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Kedudukan dan Fungsi
 - 1. Kedudukan
 - 2. Fungsi
- D. Peran Strategi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Perencanaan
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Sasaran Strategi
 - 4. Arah Kebijakan
- B. Penetapan Kinerja Direktorat Narkotika Direktorat Narkotika
Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
- B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
- C. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan. Perencanaan Kinerja juga merupakan tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional. Manfaat Perencanaan Kinerja salah satunya adalah menghubungkan perencanaan strategis, perencanaan tindakan, maupun perencanaan operasional secara rinci.

A. PERENCANAAN

Rencana Strategis merupakan penjabaran yang memuat visi, misi tujuan, sasaran strategi, target, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), bertujuan menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba secara nasional, tujuan tersebut salah satu sasaran strategis yang terkandung didalam Rencana Strategis Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan TA. 2022. Rencana Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan 2024

Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan T.A. 2022 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

1. Visi

“Menjadi satuan kerja yang mampu menjalankan tugas pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika alami dan Narkotika Sintetis secara profesional.”

2. Misi

- a. Melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika Alami dan Narkotika Sintetis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Melakukan pembinaan serta pengawasan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika Alami dan Narkotika Sintetis agar berjalan secara profesional.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika Alami dan Narkotika Sintetis.

3. Sasaran Strategis

Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkotika alami maupun sintetis.
- b. Meningkatnya Pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya.

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan adalah menurunkan prevalensi, menekan demand, dan memutus supply melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan Narkotika Alami dan Sintetis.

Strategi Direktorat Narkotika Bidang Pemberantasan dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas penyelidikan, penyidikan, operasi terpadu, dan operasi mandiri yang berkoordinasi antar instansi terkait.

B. PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT NARKOTIKA DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN TAHUN 2024

Penetapan Kinerja Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja Direktorat Narkotika/BNNP Tahun 2024

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Outcome	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21	412 Berkas
	Direktorat Narkotika (Pusat)	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21	30 Berkas
	34 BNNP	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21	382 Berkas
2	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang dimusnahkan	11 Operasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan 2024

Sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan pada tahun 2024 dan setelah dilakukan 8 kali refocusing Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan mempunyai 2 Sasaran Strategis yang kemudian dijabarkan menjadi 3 Indikator Kinerja Utama (*output*). Ketiga indikator kinerja tersebut telah terealisasi dan bahkan capaiannya telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang P21	412 Berkas	733 Berkas	177%
	Direktorat Narkotika (Pusat)	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	30 Berkas	30 Berkas	100 %
	34 BNNP	Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P21	382 Berkas	703 Berkas	280%
2.	Titik Lokasi Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya yang dimusnahkan	11 Operasi	14 Titik	127%
	Pusat/Direktorat Narkotika	Jumlah Titik Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	6 Titik Lokasi	9 Titik	150 %
	BNNP Nanggroe Aceh Darussalam	Jumlah Titik Lokasi Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	2 Titik Lokasi	2 Titik	100 %
	BNNK Lhokseumawe	Jumlah Titik Lokasi Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	1 Titik Lokasi	1 Titik	100 %
	BNNP Sumatera Utara	Jumlah Titik Lokasi Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	2 Titik Lokasi	2 Titik	100 %

Berdasarkan capaian indikator Kinerja Utama Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan Tahun 2024, sebagaimana Tabel 2 tersebut diatas, realisasi capaian rata-rata melebihi target output.

B. ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024.

Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi, selanjutnya capaiannya dipersentasikan, sehingga dapat diketahui bahwa target yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak tercapai atau bahkan terlampaui.

Secara umum 2 (dua) sasaran strategis yang terjabarkan dalam 2 (dua) indikator kinerja utama Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan BNN Tahun Anggaran 2024 seluruh target yang telah ditetapkan realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Peningkatan tersebut disatu sisi dipengaruhi oleh semakin banyaknya orang yang berani mengambil risiko terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena motivasi mendapatkan uang dalam jumlah besar dan masih lemahnya penegakan hukum terhadap para tersangka.

Untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut di atas perlu dilakukan upaya-upaya menambah dan melengkapi peralatan IT, menambah atau meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan penegakan hukum atau menekan supply narkoba dan prekursor narkoba ilegal yang masuk ke Indonesia dan terutama dengan penambahan tenaga penyidik di BNN.

Di sisi lain, BNN dihadapkan pada keterbatasan sarana prasarana pendukung seperti: ruang tahanan (sebagian besar BNNP belum mempunyai

ruang tahanan karena kantor masih berstatus kontrak, sehingga harus menitipkan tahanan ke kantor kepolisian setempat), peralatan teknologi belum tersedia, terutama di wilayah pelabuhan tidak resmi dan tidak terjaga (masih banyak jalur tikus yang ditenggarai peredaran gelap narkoba).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Dokumen Penetapan Kinerja BNN Tahun Anggaran 2024, Direktorat Narkoba Deputy Bidang Pemberantasan memiliki **Pagu Anggaran Awal** sebesar Rp. ***Rp. 30,840,043,000 (Tigapuluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)*** atas kebijakan Pemerintah dilakukan penghematan Anggaran (*Refocusing*) dan *Automatic Adjustment (AA)* sehingga mengalami perubahan **Pagu Anggaran Akhir** sebesar ***Rp. 29,124,473,100 (Duapuluh Sembilan Milyar Seratus Duapuluh Empat Juta Empatatus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah)***.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung Kegiatan di Pusat/Direktorat Narkoba dan di Daerah/BNNP.

Direktorat Narkoba Deputy Bidang Pemberantasan BNN menerima anggaran sebesar **Rp. 9.795.298.000,- (Sembilan Milyar Tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)** anggaran tersebut digunakan untuk mendukung 2 (dua) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi penggunaan anggaran Direktorat Narkotika Deputi Pemberantasan BNN tahun 2024.

No.	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
1.	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika	6.458.168.000	6.265.973.112	192.194.888	97 %
2.	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	3.337.130.000	3.336.520.513	609.487	100 %
Jumlah/% rata-rata		9.795.298.000	9.602.493.625	192.804.375	98,03 %

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 3 tersebut diatas, Direktorat Narkotika pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa/optimalisasi anggaran yang tidak diserap sebesar **Rp. 192.804.375,- (Seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)**

Kemudian Pagu Alokasi Anggaran untuk mendukung kegiatan Output (5354) berkas perkara tindak pidana narkotika dan titik lokasi lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya di daerah sebesar **Rp. 19.329.175.100,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).**

Adapun breakdown alokasi anggaran yang diberikan untuk Satker Daerah/ BNNP adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi penggunaan anggaran di Daerah/BNNP tahun 2024

No.	Program /Kegiatan /Output/Suboutput/ komponen/Akun	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5	6
1	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika				
1.	BNNP Aceh (Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika)	635.000.000	620..292.590	14.707.410	98 %
	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	436.290.000	432.474.000	3.816.000	99 %
	BNNK Lhokseumawe Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	45.300.000	45.292.200	7.800	100 %
2.	BNNP Sumut (Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika)	1.316.020.000	1.099.073.000	216.947.000	96 %
	Titik Lokasi Lahan Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya	437.028.000	297.014.000	140.014.000	68 %
3.	BNNP Sumatera Barat	433.996.000	431.041.683	2.954.317	99 %
4.	BNNP Riau	602.500.000	597.449.000	5.051.000	99 %
5.	BNNP Kepulauan Riau	635.416.000	635.340.550	75.450	100 %

6.	BNNP Bangka Belitung	293.177.000	292.291.885	885.135	100%
7.	BNNP Jambi	516.716.100	516.655.580	60.520	100%
8.	BNNP Bengkulu	427.630.000	427.630.000	0	100%
9.	BNNP Sumsel	487.604.000	485.438.837	2.191.163	100%
10.	BNNP Lampung	299.950.000	299.886.000	64.000	100%
11.	BNNP Jabar	902.000.000	901.990.000	10.000	100%
12.	BNNP DKI	461.973.000	461.632.350	340.650	100%
13.	BNNP Banten	482.700.000	482.665.900	34.100	100%
14.	BNNP D.I.Yogyakarta	364.277.000	363.783.200	493.800	100%
15.	BNNP Jawa Tengah	672.411.000	669.807.438	2.603.562	100%
16.	BNNP Jawa Timur	823.680.000	823.424.488	255.512	100%
17.	BNNP Kaltara	550.351.000	522.095.650	28.255.350	95%
18.	BNNP Kaltim	619.701.000	619.647.221	53.779	100%

19.	BNNP Kalbar	496.850.000	495.344.925	1.505.075	100%
20.	BNNP Kalsel	745.000.000	737.573.501	7.427.499	99%
21.	BNNP Kalteng	346.244.000	345.786.985	457.015	100%
22.	BNNP Bali	610.000.000	609.914.000	86.000	100%
23.	BNNP NTB	360.000.000	359.148.839	851.161	100%
24.	BNNP NTT	243.190.000	240.794.641	2.395.359	99%
25	BNNP Sulawesi Utara	502.415.000	500.694.464	1.724.354	100%
26.	BNNP Sultra	487.880.000	485.227.105	2.652.895	99%
27.	BNNP Sulteng	599.683.000	598.390.014	1.292.986	100%
28	BNNP Sulsel	506.932.000	506.314.275	617.725	100%
29.	BNNP Gorontalo	300.000.000	299.510.700	489.300	100%
30	BNNP Sulbar	412.663.000	412.634.500	28.500	100%
31	BNNP Maluku	624.850.000	623.806.990	101.043.010	100%
32	BNNP Maluku Utara	477.050.000	477.050.000	0	100%
33	BNNP Papua	700.000.000	699.911.836	88.167	100%

34	Papua Barat	476.698.000	472.609.535	88.465	100%
Jumlah% rata-rata		19.329.175.100	18.889.637.862	439.537.238	97,72%

Berdasarkan Realisasi Anggaran sebagaimana Tabel 4 tersebut diatas, BNNP pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sisa/optimalisasi anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. **439.537.238 (Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tigapuluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).**

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian tersebut di atas antara lain :

1. Setiap Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk mendukung kegiatan disusun sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan sehingga tidak terjadi in-efisiensi penggunaan anggaran.
2. Penugasan personel diatur sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan ditunjuk sesuai dengan keahlian atau kompetensi masing-masing, sehingga penggunaan anggaran dapat lebih efisien.
3. Pemanfaatan peralatan teknologi intelijen yang dimiliki BNN mampu mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sehingga anggaran yang digunakan untuk operasional lebih efisien.

4. Optimalisasi metode analisa data intelijen yang akurat dan efektifitas kerja anggota di lapangan terbukti berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas pengungkapan kejahatan narkoba.

Di tahun 2024 Anggaran sebesar **Rp. 29,124,473,100 (Duapuluh Sembilan Milyar Seratus Duapuluh Empat Juta Empat ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah)** dengan Realisasi **Rp. 28.492.131.487,- (Dua puluh Delapan Milyar Empat ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)** atau sebesar 97,82% dengan sisa anggaran yang tidak terserap **Rp. 632.341.613 (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah)**, dengan pencapaian kinerja ini menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan atau penggunaan anggaran pada Direktorat Narkoba Deputy Bidang Pemberantasan BNN dan BNNP baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya inovasi dan terobosan yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pemberantasan BNN, khususnya dalam hal efisiensi penggunaan anggaran melalui penyusunan RAB yang akurat, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan dan kompetensi anggota yang ditugaskan di lapangan, pemanfaatan peralatan teknologi intelijen secara tepat dan optimalisasi metode analisa data intelijen serta mengefektifkan cara kerja anggota di lapangan.

C. Perbandingan Capaian Perkara tahun 2022 s.d 2024

Direktorat Narkoba mendistribusikan alokasi anggaran ke satuan kerja wilayah berdasarkan pagu yang diterima tiap tahunnya. Dari tahun 2022 s.d 2024 Direktorat Narkoba dan jajaran BNNP mengalami penurunan dari segi anggaran. Pencapaian kinerja dari satuan kerja wilayah selalu melampaui target dari tahun 2022, dikarenakan adanya kegiatan² utk menindaklanjuti laporan informasi, aduan masyarakat yang tidak terdukung anggaran. Dari data tersebut dapat disimpulkan selama tiga tahun terakhir (tahun 2022 s.d 2024) tidak ada penurunan maupun peningkatan dalam hal capaian perkara tersebut.

Adapun tabel perbandingan capaian selama 3 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

CAPAIAN OUTPUT DAN REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA TA. 2022 S/D 2024

SATKER	TA. 2022					TA. 2023					TA. 2024				
	KEGIATAN			ANGGARAN		KEGIATAN			ANGGARAN		KEGIATAN			ANGGARAN	
	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI
Pusat	25	27	22	3,569,540,000	3,361,851,684	30	31	30	5,680,300,000	5,629,378,617	30	40	30	6,458,168,000	6,265,973,112
Daerah	529	1,231	1,040	34,101,693,885	32,757,397,257	577	1,145	950	30,491,600,000	30,145,203,137	382	876	706	18,410,557,100	18,114,857,662
	554	1,258	1,062	37,671,233,885	36,119,248,941	607	1,176	980	36,171,900,000	35,774,581,754	412	916	736	24,868,725,100	24,380,830,774

CAPAIAN OUTPUT DAN REALISASI ANGGARAN
KEGIATAN OPERASI PEMUSNAHAN TITIK LOKASI LADANG GANJA TA. 2022 S/D 2024

SATKER	TA. 2022					TA. 2023					TA. 2024				
	KEGIATAN			ANGGARAN		KEGIATAN			ANGGARAN		KEGIATAN			ANGGARAN	
	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI	TARGET	REALISASI	P-21	PAGU	REALISASI
Pusat	8	8	15	4,940,000,000	4,854,023,666	6	6	20	2,905,359,000	2,904,846,682	6	6	9	3,337,130,000	3,336,520,513
Daerah	6	7	8	1,371,971,000	1,354,472,500	5	7	7	691,956,000	676,462,800	5	5	5	918,618,000	774,780,200
	14	15	23	6,311,971,000	6,208,496,166	11	13	27	3,597,315,000	3,581,309,482	11	11	14	4,255,748,000	4,111,300,713

D. IMPLEMENTASI E-MINDIK

Sebagai bentuk Akuntabilitas kinerja khususnya penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang bersumber pada Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Direktorat Narkotika sebagai Pembina fungsi penyidikan berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh penyidik BNN. Aplikasi E-Mindik merupakan bagian dari Sistem Informasi Interdiksi Terpadu hal ini merupakan terobosan dalam efisiensi anggaran dan kegiatan dimana dalam membangun system

digunakan sarana prasarana yang sudah ada. Pada bagian ini akan ditampilkan resume yang bersumber dari aplikasi E-Mindik periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel. 1 Data Tersangka Berdasarkan LKN

No	Jenis LKN	Jumlah Tersangka
1	Narkotika	1028
2	TPPU	13
Total		1041

Tabel.2 Data Tersangka Berdasarkan Rentan Usia

No	Rentan Usia	Jumlah Tersangka
1	<15	3
2	15-24	155
3	25-34	384
4	35-44	327
5	45-54	144
6	55-64	23
7	>64	2
Total		1038

Tabel. 3. Data Tersangka Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Tersangka
1	Laki-Laki	962
2	Perempuan	79
Total		1041

Tabel. 4. Data Tersangka Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Tersangka
1	Islam	903
2	Kristen	89
3	Katolik	19
4	Hindu	15
5	Budha	12
6	Khonghucu	0
7	Penghayat Kepercayaan	0
8	Lainnya	3
Total		1041

Tabel. 5. Data Tersangka Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Tersangka
1	Tidak Sekolah	22
2	Sekolah Dasar / Sederajat	196
3	Sekolah Menengah Pertama / Sederajat	182
4	Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan / Sederajat	558
5	Akademi / Diploma	22

No	Pendidikan	Jumlah Tersangka
6	Diploma IV / Strata 1	57
7	Strata 2	4
Total		1041

Tabel. 6. Data Tersangka Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Tersangka
1	Belum/Tidak Bekerja	218
2	Peternak	1
2	Nelayan/Perikanan	23
4	Industri	3
5	Konstruksi	1
6	Transportasi	1
7	Karyawan Swasta	222
8	Karyawan BUMN	1
9	Karyawan Honorer	3
10	Buruh Harian Lepas	70
11	Mengurus Rumah Tangga	32
12	Buruh Tani/Perkebunan	5
13	Buruh Nelayan/Perikanan	5
14	Tukang Cukur	1
15	Tukang Listrik	2
16	Tukang Batu	1
17	Tukang Kayu	1
18	Tukang Las /Pandai Besi	1
19	Pelajar/Mhasiswa	103

No	Pekerjaan	Jumlah Tersangka
20	Mekanik	3
21	Pegawai Negeri Sipil	4
22	Konsultan	1
23	Tentara Nasional Indonesia	1
24	Pengacara	1
25	Kepolisian RI	10
26	Pelaut	2
27	Perdagangan	6
28	Sopir	34
29	Pedagang	15
30	Lainnya	232
31	Petani/Pekebun	38
Total		1041

Tabel. 7. Data Tersangka Berdasarkan Pekerjaan (Lainnya)

No	Pekerjaan	Jumlah Tersangka
1	Berkebun	1
2	Buruh	3
3	Buruh Bangunan	1
4	Buruh Harian Lepas	2
5	EKs Polri	1
6	Freelance Surfer	1
7	Ibu Rumah Tangga	1
8	Jual Air Profil	1
9	Mekanik	1

No	Pekerjaan	Jumlah Tersangka
10	SPG Freelance	1
11	Narapidana LAPas Klas I Lampung	1
12	OJek	2
13	Narapidana (Narkotika)	2
14	Pedagang Ikan	1
15	Ojek Online	1
16	Pelath Surfing	1
17	Pelikis 1	1
18	Pemandu Wisata	1
19	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil	1
20	Petugas Keamanan	1
21	Security	1
22	Makelar Travel	1
23	Mahasiswa	1
24	Swasta	14
25	Kerjasawit	1
26	Narapidana Lapas Klas II A Mataram	1
27	Tukang	1
28	Warga Binaa Pemasyarakatan	5
29	Warga Binaan Klas II A Bekasi	1
30	Warga Binaan Klas II A Pekalongan	1
31	Warga Binaan Lapas Narkotika	1
32	Warga Binaan Rutan Klas I Bandar lampung	1
33	Tukang tato	1

No	Pekerjaan	Jumlah Tersangka
34	wiraswasta	169
35	Wiraswasta (Freelance Desain Grafis)	1
36	Wirasastwa (Tani)	1
37	Wiraswasta/ Operator Alata Berat	2
38	Wiraswata / WB Lapas Tangerang	1
Total		232

Tabel. 8. Data Jumlah LKN berdasarkan Jenis

No	Jenis LKN	Jumlah LKN
1	Narkotika	653
2	TPPU	13
Total		666

Tabel. 9. Data Jumlah Berkas Perkara Berdasarkan Jenis LKN

No	Jenis LKN	Jumlah Berkas Perkara
1	Narkotika	963
2	TPPU	13
Total		976

Tabel. 10. Data Barang Bukti Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Jumlah (gram)	Keterangan
1	Ganja	2.191.527,09	-
2	Ganja-Sintetic	1.077,69	-

3	Shabu	721.637,05	-
4	Ekstasy	139.150,03	292.748 Butir
5	Heroin	2.760,00	-
6	Cocain	4.348,33	-
7	Lain lain	176.177,30	-
Total		3.236.677,49	

Tabel. 11. Lokasi Kejadian Per daerah

No	Wilayah	Jumlah
1	BSumatera Utara	71
2	Jawa barat	61
3	Bali	59
4	DKI Jakarta	51
5	Jawa Timur	49
6	Sulawesi Selatan	47
7	Kalimantan Timur	41
8	Riau	40
9	Aceh	33
10	Sulawesi Tengah	32
11	Sumatera Selatan	32
12	Banten	32
13	Jambi	26
14	Jawa tengah	25
15	Nusa Tenggara Barat	24
16	Kep.Riau	23

No	Wilayah	Jumlah
17	Kalimantan Selatan	20
18	DIY	20
19	Kalimantan Barat	19
20	Kalimantan Tengah	19
21	Kalimantan Utara	16
22	Sumatera Barat	14
23	Kep. Bangka Belitung	13
24	Sulawesi barat	11
25	Mauluku	11
26	Sulawesi tenggara	11
27	Papua	10
28	Sulawesi Utara	10
29	Bengkulu	10
30	Lampung	8
31	Papua Barat	7
32	Maluku Utara	5
33	Nusa Tenggara Timur	3
34	Gorontalo	1
Total		858

Tabel. 12. Data Jumlah LKN Berdasarkan Kategori Barang Bukti

No	Kategori	Jumlah LKN	Jumlah (Gram)
1	Ganja	182	2.191.527,09

2	Ganja-Sintetic	8	1.077,69
3	Shabu	389	721.637,05
4	Ekstasy	63	139.150,03
5	Heroin	1	2.760,00
6	Cocain	4	4.348,33
7	Lain lain	14	176.177,30
Total			3.236.677,49

BAB IV

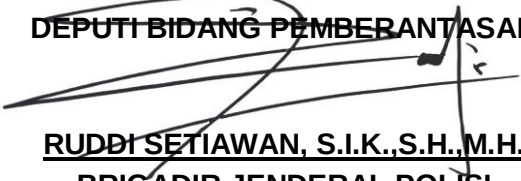
PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum target kinerja Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan BNN dan BNNP Tahun 2024 dapat tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, Pencapaian ini dipengaruhi oleh:
 - a. Efisiensi Penggunaan anggaran.
 - b. Efektifitas pelaksanaan tugas oleh anggota di lapangan.
 - c. Optimalnya dukungan teknologi intelijen dan human intelijen.
 - d. Optimalisasi metode analisa data intelijen dan mensinergikan sumber daya yang ada di masing-masing Direktorat.
 - e. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara BNN dengan Instansi terkait baik nasional, regional maupun Internasional.
2. Walaupun akuntabilitas kinerja Direktorat Narkotika Deputy Bidang Pemberantasan dan BNNP berhasil melebihi target yang telah ditetapkan namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan capaian tersebut, antara lain:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyelidik, penyidik, dan +analisis intelijen melalui pendidikan dan latihan di dalam maupun di luar negeri.

- b. Menambah dan melengkapi peralatan intelijen untuk mengimbangi modus operandi yang berkembang.
- c. Perlu penambahan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan peralatan penyelidikan dan penyidikan.
- d. Mengoptimalkan sistem analisa data intelijen yang sudah ada untuk mendukung keakurasian penentuan dan penetapan target operasi serta penentuan cara bertindak dilapangan.
- e. Mengoptimalkan penelusuran dan penyitaan aset para pelaku kejahatan narkoba dalam rangka menghentikan aktifitas peredaran gelap narkoba.

DIREKTUR NARKOTIKA
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN

RUDDI SETIAWAN, S.I.K., S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN

1. REALISASI OUTPUT DAN ANGGARAN PENGUNGKAPAN KASUS PERKARA 2024

[illegible]

2. REALISASI OUTPUT DAN ANGGARAN PEMUSNAHAN LAHAN GANJA DAN TANAMAN TERLARANG LAINNYA TAHUN 2024

U	JENIS	OUTPUT				ANGGARAN	
		OPK	PAK	IK	Y	PAK	Y
1	PAK	4 (ops)	4 (ops)	4 (ops)	4 (ops)	130.000	130.000
2	PAK	7 (ops)	7 (ops)	7 (ops)	7 (ops)	40.000	40.000
3	PAK	1 (ops)	1 (ops)	1 (ops)	1 (ops)	40.000	40.000
4	PAK	7 (ops)	7 (ops)	7 (ops)	7 (ops)	40.000	40.000
Jumlah		19 (ops)	19 (ops)	19 (ops)	19 (ops)	250.000	250.000

3. Gambar Lokasi Pemusnahan Ladang ganja

